



IKHTISAR LAPORAN HASIL  
PENGAWASAN

INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Semester II TAHUN 2025

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
JLN. ADE IRMA NASUTION TELP (0711) 354221 PALEMBANG

# **BAB I**

## **INFORMASI UMUM**

### **A. Dasar Hukum**

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempedomani ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 37/KPTS/ITDAPROV/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

## **B. Struktur Organisasi**

Susunan struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas :

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris, terdiri atas :
  1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  2. Subbagian Keuangan.
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Inspektur Daerah Pembantu terdiri dari :
  1. Inspektur Pembantu I;
  2. Inspektur Pembantu II;
  3. Inspektur Pembantu III;
  4. Inspektur Pembantu IV;
  5. Inspektur Pembantu Investigasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana.

## **C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan**

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan sampai dengan Semester II Tahun 2025 disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) wajib membuat Laporan Hasil Pengawasan dan menyampaikannya kepada Pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi, selain itu APIP wajib menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan secara berkala. Ikhtisar tersebut merupakan ringkasan atas Laporan Hasil Pengawasan sampai dengan Semester II Tahun 2025 yang diselesaikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, meliputi pemeriksaan, reviu, evaluasi, monitoring dan evaluasi, pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya.

Tujuan penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan adalah :

1. Memberikan informasi tentang target dan realisasi penugasan pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh APIP.
2. Memberikan informasi tentang temuan hasil pengawasan yang dijumpai dalam penugasan.
3. Memberikan informasi tentang pemantauan tindaklanjut temuan hasil pengawasan secara berkala.

4. Mengevaluasi hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

#### D. Program Pengawasan dan Realisasinya

Tabel 1.1

#### Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya

Berdasarkan PKPT dan Non PKPT sampai dengan Semester II Tahun 2025

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kegiatan Pengawasan	Rencana		Realisasi		Keterangan
		PKPT	Non PKPT	PKPT	Non PKPT	
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	
		OP	OP	OP	OP	
<b>1.</b>	<b>Pengawasan</b>	<b>574</b>	<b>158</b>	<b>403</b>	<b>158</b>	
<b>1)</b>	<b>Audit Kinerja</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
	Audit Kinerja di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan	6		2		
<b>2)</b>	<b>Audit Kepatuhan</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	
	Audit kepatuhan di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan	12		9		
<b>3)</b>	<b>Audit Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	
a	Probit Audit	5		6		
b	Audit Kepatuhan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4		1		
c	Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	1		1		
d	Pemeriksaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota (GWPP)	11		5		
e	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	6		7		
f	Pemeriksaan Khusus	16		16		
g	Pemeriksaan SMA/SMK	12		14		
h	Pemeriksaan terhadap Kegiatan Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1		1	
<b>4)</b>	<b>Reviu</b>	<b>237</b>	<b>13</b>	<b>76</b>	<b>13</b>	
a	Reviu Dana DAK (tentative)	11		11		
b	Reviu Pengamanan dan Penertiban BMD (MCSP)	1		-		
c	Reviu Standar Harga Satuan (SHS)	1		1		
d	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	5		18		
e	Reviu Analisis Standar Biaya (ASB)	1		-		

f	Reviu RKPD Tahun 2026	1		1		
g	Reviu RKPD Perubahan Tahun 2025	1		1		
h	Reviu KUA-PPAS Tahun 2026	1		1		
i	Reviu KUPA-PPAS Tahun 2025	1		1		
j	Reviu Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	40		-		
k	Reviu Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025	40		-		
l	Reviu RKA Perubahan Tahun 2025	40		13		
m	Reviu RKA Tahun 2026	40		13		
n	Reviu Penyerapan Anggaran Belanja, Realisasi PAD, Pengadaan Barang dan Jasa	1		-		
o	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	1		1		
p	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	1		1		
q	Reviu Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Tahun 2024	1		1		
r	Reviu RPJMD Tahun 2025-2029	1		1		
s	Reviu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	40		4		
t	Reviu Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis	1		-		
u	Reviu Pengelolaan BMD	1		1		
v	Reviu Tata Kelola Perizinan	1		1		
w	Reviu Manajemen ASN	1		1		
x	Reviu Layanan RSUD	4		4		
y	Reviu Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah	1		1		
z	Reviu terhadap rancangan keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri, sekolah menengah kejuruan negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri Di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025/2026		1		1	
aa	Reviu pemenuhan kebutuhan SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir		1		1	
bb	Reviu Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		5		5	
cc	Reviu Pelayanan Publik		2		2	
dd	Reviu Dana Hibah		2		2	
ee	Melakukan Reviu Belanja Honorarium pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan		2		2	
<b>5)</b>	<b>Evaluasi</b>	<b>89</b>	<b>2</b>	<b>89</b>	<b>2</b>	
a	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17		17		
b	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB) Perangkat Daerah di Lingkungan	25		25		

	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan				
c	Evaluasi Implementasi Sistem AKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	1		1	
d	Penilaian Mandiri Zona Integritas Provinsi Sumatera Selatan	1		1	
e	Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1		1	
f	Penilaian Mandiri Manajemen Risiko Indeks (MRI)	44		44	
g	Evaluasi Peta Risiko (Risk Register) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan		1		1
h	Evaluasi Tata Kelola Unit Donor Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sumatera Selatan		1		1
<b>6)</b>	<b>Pemantauan</b>	<b>101</b>	<b>116</b>	<b>101</b>	<b>116</b>
a	Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan (Internal dan Eksternal)	4		4	
b	Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia	11		11	
c	Pemantauan Capaian Strategi Nasional Rencana Aksi Daerah Perencanaan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK)	2		2	
d	Monitoring Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	44		44	
e	Pemantauan LKHASN	40		40	
f	Pemantauan Tindak Lanjut LHE Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel		44		44
g	Monitoring terhadap pembangunan Zona Integritas pada UPTB Palembang I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan		1		1
h	Pengawasan Pengadaan PPPK Tahap II Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Tahap Persiapan sampai dengan seleksi administrasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan		1		1
i	Pemantauan Rencana Tindak Lanjut atas Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024		4		4
j	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Semester I pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan		1		1
k	Monitoring Pengendalian Inflasi		8		8
l	Monitoring Penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Sidak Stok Komoditas beras		2		2
m	Monitoring dan Evaluasi Harga Pangan Khususnya beras Medium		6		6
n	Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024		4		4

o	Monitoring terhadap pelaksanaan Reviu Standar Pelayanan Minimal		2		2	
p	Melakukan Pemantauan Hasil SPMB pada SMA/SMK di Kota Palembang		32		32	
q	Melakukan Monitoring atas Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat		2		2	
r	Monitoring terhadap Pelaksanaan Manajemen Risiko di Kabupaten Banyuasin		1		1	
s	Melakukan Pemantauan atas Tindak Lanjut dan Penyelesaian Pengaduan SP4N LAPOR		4		4	
t	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Desa		3		3	
u	Melakukan Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pengawasan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Triwulan IV		1		1	
<b>7)</b>	<b>Pengawasan Lainnya</b>	<b>74</b>	<b>26</b>	<b>76</b>	<b>26</b>	
a	Asistensi Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Sumatera Selatan	44		44		
b	Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	25		25		
c	Asistensi Pembangunan Zona Integritas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	4		6		
d	Pembangunan Kapabilitas APIP Pemerintah Level 3 Inspektorat Daerah	1		1		
e	Pengawasan Pengadaan Aparatur sipil Negara (ASN) Pemprov Sumsel TA 2024 tahap pengumuman hasil seleksi PPPK dan CPNS		1		1	
f	Pendampingan Pemahaman dan Kelengkapan, Akurasi serta validasi data populasi responden atas terkait Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025		1		1	
g	Sosialisasi whistleblowing system tindak pidana korupsi terintegrasi tahun 2025 pada SMA Negeri dan SMK Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan		4		4	
h	Asistensi renaksi hasil evaluasi AKIP Pemprov tahun 2024 di Badan Penghubung		1		1	
i	Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025		19		19	
<b>B.</b>	<b>Kegiatan Non Pengawasan</b>	<b>94</b>	<b>-</b>	<b>94</b>	<b>-</b>	
<b>1</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>94</b>	<b>-</b>	<b>94</b>	<b>-</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan	94		94		
	<b>Jumlah</b>	<b>668</b>	<b>158</b>	<b>497</b>	<b>158</b>	

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Semester II Tahun 2025, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki 6 (enam) kegiatan pengawasan yaitu Audit Kinerja, Audit Ketaatan, Audit Dengan Tujuan Tertentu, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya. Sedangkan kegiatan non pengawasan berupa kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

Sesuai dengan PKPT dan Non PKPT Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, terdapat 732 objek pengawasan. Realisasi sampai dengan Semester II tahun 2025 sebanyak 561 objek pengawasan atau 76,64%.